

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 LATAR BELAKANG

Kesenjangan antar wilayah dalam pembangunan terjadi karena perbedaan infrastruktur, sumber daya alam, dan sumber daya manusia di berbagai macam daerah (Ardani, 1992). Kesenjangan pembangunan merupakan suatu yang tidak sejalan dengan proses yang terjadi pada pembangunan itu sendiri. Kesenjangan ekonomi sering dipergunakan sebagai salah satu faktor dari rata-rata perkapita yang berbeda-beda, tingkat pendapatan antar kelompok, lapangan kerja antar kelompok, serta antar wilayah.

Menurut Adisasmita (2014) kesenjangan antar daerah/wilayah ialah kesenjangan yang diakibatkan bukan hanya dari distribusi pendapatan, namun juga adanya ketimpangan pembangunan terhadap wilayah pada suatu negara. Kesenjangan menjurus pada kualitas hidup rata-rata pada semua penduduk, dikarenakan kesenjangan antar daerah adalah perbedaan dari faktor pemberian awal atau *Endowment Faktor* (Kuncoro, 2006). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Gajdos (2006), kondisi ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik, keadaan sebuah lokasi serta adanya hal yang terjadi pada dua entitas atau lebih di suatu struktur daerah. Oleh karena itu, seharusnya kesenjangan perlu dikaji dengan banyak aspek seperti halnya aspek sosial, keadaan lokasi, politik dan manajemen, kelembagaan, lingkungan, fasilitas umum, dan sebagainya.

Menurut Ardani (1992) ketimpangan/kesenjangan dari berbagai wilayah ialah konsekuensi yang logis terhadap pembangunan dan salah satu tahapan yang

terjadi dalam sebuah pembangunan yang dilakukan. Ini pada dasarnya terjadi dikarenakan munculnya perbedaan mengenai sumber daya alam yang dikandung dan kondisi geografis yang ada pada setiap daerah. Hal tersebut mengakibatkan setiap daerah mempunyai potensi wilayah yang berbeda-beda untuk meningkatkan kegiatan pembangunan sehingga terbentuknya “daerah maju” (development region) dan “daerah tertinggal” (underdevelopment region). Kesenjangan yang terjadi pada suatu daerah mustahil untuk ditiadakan, tetapi perlu adanya kegiatan untuk meminimalisir tingkat ketimpangan atau kesenjangan pada suatu daerah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh tingginya kesenjangan yang terjadi antar wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah karena ada wewenang pemerintah daerah dan masyarakat daerah tersebut dalam menentukan kebijakan masing-masing sehingga kebijakan yang diciptakan lebih efektif. Menurut Syafrizal (2008) tersedianya kewenangan tersebut mengakibatkan keinginan publik untuk mencari potensi sebuah daerah akan meningkat daripada sebelumnya, dengan hal tersebut diharapkan laju pembangunan terjadi di daerah dapat di tingkatkan serta secara bersamaan kesenjangan untuk pembangunan antar wilayah daerah akan terjadi pengurangan.

Kesenjangan pendapatan antar wilayah menjadi sebuah fenomena yang penting sehingga perlu dikaji lebih jauh serta dianalisis karena dapat mengubah dan menentukan kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran, dan dapat terorganisir secara baik dan efisien, yang ditentukan oleh keterbatasan untuk alokasi dana dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan terkait jalan untuk

meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, penelitian ini juga akan menganalisis dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dan IPM masing-masing daerah terkait kesenjangan antar wilayah.

Kesenjangan wilayah di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi, terutama perbedaan kualitas pembangunan yang terjadi pada daerah Indonesia Barat dan Timur. Kurun waktu 30 tahun (1986-2016) PDRB Wilayah Bagian Barat Indonesia sangat didominasi dan berada di atas angka 80% total PDB nasional. Hingga Triwulan I tahun 2019, Wilayah Jawa dan Sumatera sebagai kontributor tertinggi di Indonesia (80,39 %). Kesenjangan antar wilayah bisa dilihat lebih lanjut dengan keadaan 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal di Indonesia.

Keberhasilan suatu pembangunan tidak cukup hanya dilihat dan ditentukan oleh keberhasilan suatu pembangunan untuk bidang ekonomi saja, namun perlu adanya keterlibatan aspek untuk pembangunan kualitas manusia. *Human Development Index* atau IPM seharusnya mendapatkan tempat yang lebih baik dalam suatu rancangan untuk pembangunan, dikarenakan tidak adanya daerah yang sedang berkembang dan akan tumbuh dengan pesat hanya dengan memprioritaskan SDA (Sumber Daya Alam) yang dimiliki suatu daerah. Perbaikan kesenjangan bisa dicapai dengan dilakukan dengan perbaikan pada pembangunan tingkat kesejahteraan manusia, seperti akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Menurut Sjafrizal (2012) beberapa aspek penting yang mengakibatkan adanya kesenjangan antar wilayah yaitu:

1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki

Wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang lebih baik akan mendapatkan kuantitas produksi dan menghasilkan komoditas barang eksklusif dengan biaya yang lebih minim daripada daerah SDA yang terbilang terbatas.

2. Perbedaan keadaan demografi antar wilayah

Daerah yang memiliki kondisi yang cukup baik akan lebih berkesempatan memiliki kinerja yang luas dibandingkan dengan dengan wilayah yang memiliki kondisi demografis yang lumayan rendah, hal tersebut dapat meningkatnya investasi secara berkelanjutan, meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan serta meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

3. Tersendatnya pergerakan barang dan jasa

Pergerakan kegiatan barang dan jasa merangkup aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh satu daerah ke daerah yang lain dan perpindahan wilayah yang baik disediakan dan dilakukan oleh pemerintah seperti transmigrasi atau migrasi spontan. Oleh sebab itu jika pergerakan kurang baik sehingga produksi suatu daerah yang *overload* tidak dapat diperdagangkan ke daerah lain fokus kegiatan ekonomi di wilayah.

4. Alokasi dana untuk pembangunan antar wilayah

Dana yang diturunkan untuk pembangunan berawal dari bagian pemerintahan ataupun bagian swasta, pada suatu skema pemerintah yang berotonomi sehingga anggaran pemerintah akan lebih banyak di proyeksikan ke daerah yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah akan lebih kecil. Untuk investasi swasta lebih besar dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang berlaku.

1.1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan sehubungan dengan fenomena yang ada pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat?

1.1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap disparitas pendapatan antar wilayah di Sumatera Barat?
2. Melakukan analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap disparitas pendapatan antar wilayah di Sumatera Barat?

1.1.4 Manfaat Penelitian

1. Agar terjadinya peningkatan pemahaman bagi penulis dan pembaca terkhususnya terkait pengaruh Pengeluaran Pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kesenjangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Barat.
2. Agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pemerintah di wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk mengambil kebijakan untuk mengurangi disparitas pendapatan antar wilayah di Sumatera Barat.

3. Kajian dan analisis dari hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan pustaka dan referensi bagi pembuatan makalah dan penelitian yang akan datang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melihat pengaruh pergerakan pemerintah dan pembentukan SDM terhadap kesenjangan antar wilayah di Sumatera Barat. Variabel dalam penelitian adalah: Ketimpangan antar wilayah (Y), Pengeluaran Pemerintah (X1), dan IPM (X2).

Batasan dalam masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini di lakukan di Sumatera Barat.
2. Penelitian ini di lakukan dengan metode analisis data panel berbasis kajian kepustakaan.

1.1.6 Sistematika Penulisan

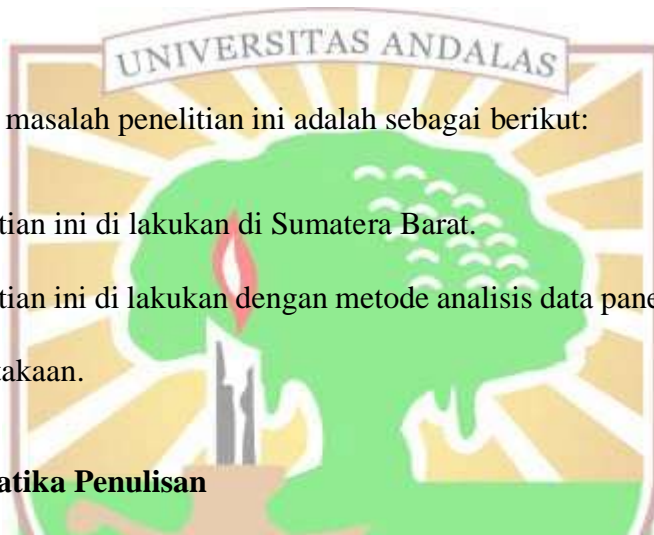
Sistematika yang dipakai pada penelitian ini memiliki enam bab, dengan uraian setiap bab yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan fenomena terkait latar belakang untuk dasar pada penentuan judul, identifikasi masalah, tujuan untuk dilakukannya penelitian, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika yang digunakan dalam penelitian

BAB 2: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang dipergunakan pada penelitian berlandaskan pendapat para-para ahli, yang dipergunakan untuk memperjelas atas pemahaman penelitian serta analisa yang lebih baik dalam penelitian ini.



BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini melingkupi terkait dengan penjelasan untuk daerah yang digunakan dalam penelitian, data yang digunakan dan sumber data yang dipakai, metode pengumpulan yang digunakan dan metode analisa yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB 4 : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Menjelaskan dan menampilkan terkait dengan gambaran umum untuk lokasi penelitian yang dilakukan.

BAB 5 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan mengenai hasil dan analisis terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tulisan mengenai penutup dari semua tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya terkandung simpulan dan saran yang dituangkan dalam penulisan yang diharapkan untuk menjadi acuan atau landasan untuk perkembangan yang lebih lanjut.

